

KORUPSI CHROMEBOOK BISA MEREMBET?

Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook diperkirakan bisa menyeret banyak pihak. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka pada Kamis (4/9/2025) dan menahannya di Rutan Salemba, Jakarta Selatan, selama 20 hari. Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jurist Tan (mantan staf khusus Mendikbudristek), Ibrahim Arief (mantan konsultan Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih (Direktur SD 2020-2021), dan Mulatsyah (Direktur SMP sekaligus KPA 2020-2021). Jurist Tan kini buron dan masuk daftar red notice Interpol. Pengadaan Chromebook tahun 2020-2022 menggunakan dana APBN Kemendikbudristek dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 9,3 triliun untuk 1,2 juta unit. Namun, perangkat berbasis Chrome OS dinilai tidak optimal digunakan guru maupun siswa. Akibatnya, negara diperkirakan merugi hingga Rp 1,98 triliun.

HACALALAH...

LIMA TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI CHROMEBOOK



Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Mendikbudristek) periode 2019-2024



Jurist Tan
Mantan Staf Khusus Mendikbudristek
era Nadiem Makarim



Ibrahim Arief
Mantan Konsultan Kemendikbudristek



Sri Wahyuningsih
Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud
tahun 2020-2021



Mulatsyah
Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekaligus Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Kemendikbud tahun 2020-2021.



BANTUAN BERAS GRATIS TERANCAM HILANG TAHUN 2026

Program bantuan pangan beras yang selama ini dinikmati jutaan keluarga miskin terancam tidak berlanjut pada 2026. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. Bantuan tersebut akan berlanjut jika usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.

Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah," kata Arief di depan Komisi IV DPR RI, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pagu anggaran Bapanas tahun depan hanya sebesar Rp233,2 miliar. Jumlah itu jauh dari cukup untuk membiayai distribusi bantuan pangan beras.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.

Supaya bantuan beras tersebut tetap ada, maka Arief mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun. Tambahan anggaran itu akan mampu memenuhi kebutuhan untuk bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, selain itu bantuan pangan bencana juga tetap bisa berjalan.

"Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan," terangnya.

Dari Rp22,53 itu, sekitar Rp20,46 triliun diproyeksikan untuk menyalurkan bantuan beras kepada 18 juta keluarga penerima manfaat,

masing-masing 10 kilogram per bulan selama enam bulan.

Program bantuan pangan beras sendiri sudah bergulir sejak 2023 di era Presiden Joko Widodo dan terus berlanjut hingga 2025. Hingga Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai 361 ribu ton atau 98,79 persen dari target, dengan anggaran Rp4,91 triliun.

Nasib program ini kini bergantung pada keputusan pemerintah dan DPR apakah menyetujui usulan tambahan anggaran atau tidak.

Terpisah, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengingatkan kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang jika bantuan pangan beres terhenti.

Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia,

perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di

perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.

Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.

Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.

"Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu," kata Khudori kepada CNBC Indonesia.

"Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar,

total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, menyatakan dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pagu anggaran Bapanas Tahun 2026 sebesar Rp233,3 miliar. Ia juga mendukung tambahan anggaran Rp22,530 triliun yang dialokasikan untuk cadangan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta bantuan pangan beras.

"Dukungan anggaran ini semakin menguatkan swasembada pangan yang menjadi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Kami berharap agar pangan, terutama beras, tidak menjadi keresahan lagi di masyarakat," ujar Dwita Ria dalam keterangan tertulis Minggu (7/9/2025).

Dwita Ria juga memberikan perhatian terhadap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 sebesar Rp482,02 miliar. Ia berharap pelaksanaan program dapat lebih optimal mengingat realisasi DAK 2025 masih tergolong rendah.

"Karena kami lihat di halaman 12, realisasi DAK 2025 ini masih sangat rendah. Penguatan lumbung pangan saja baru Rp 1,62 miliar atau 21 persen. Pengembangan desa B2SA juga baru Rp 18,8 miliar atau 22,48 persen. Ini apa kendalanya? Mohon penjelasan," katanya.

Ia mendorong agar program Bapanas terintegrasi dengan sistem informasi pangan dan memanfaatkan mekanisme e-verifikasi real-time melalui aplikasi Krishna, sehingga distribusi tidak mengalami keterlambatan. Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tahun berjalan.

"Serapan yang tinggi diharapkan menjadi landasan persetujuan untuk anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026," pungkasnya. (han,rls,ist/lut)



Warga menerima bantuan beras.



Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah,"

**ARIEF
PRASETYO ADI**
Kepala Badan Pangan Nasional

PEMANGKASAN TUNJANGAN DPR BELUM MENYENTUH AKAR PERMASALAHAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengumumkan adanya pemangkasan tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR. Putusan tersebut menjawab tuntutan rakyat, merespons aksi demonstrasi pekan lalu. Namun demikian, putusan tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan dan belum memuaskan.

Komitmen hingga keputusan dari parpol, DPR, hingga presiden sejauh ini bisa kita kategorikan sebagai langkah reaktif untuk meredakan situasi. Jadi sebagai langkah reaktif, keputusan menghapus tunjangan perumahan dan juga penyesuaian tunjangan lain, moratorium kunker, kita bisa memahami,” ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Minggu (7/9/2025), dilansir Kompas.com.

Dia menambahkan, meski reaksi tersebut berhasil menenangkan situasi, namun jangan merasa bahwa semua telah teratasi. Sebab, lanjutnya, akar masalah yang memicu ketidakpuasan publik adalah tidak berfungsinya DPR sebagai lembaga representasi rakyat.

Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang semestinya dijalankan, saat ini justru “dibelokkan” oleh dominasi partai politik. “Dalam praktiknya, fungsi mendasar sebagai representasi rakyat itu semacam dilupakan oleh DPR. Itu bukan sekadar kekhilafan sesaat, tetapi dibuat melalui rekayasa sistem politik, sistem demokrasi yang dituangkan dalam UU Politik, yakni UU Parpol, UU Pemilu, UU MD3,” kata Lucius.

Lucius menyoroti dua hal yang membuat posisi rakyat di DPR tersingkirkan, yakni sistem “recall” anggota DPR oleh parpol dan mekanisme pengambilan keputusan yang seluruhnya bergantung pada fraksi.

“Tak ada sikap pribadi anggota yang bisa menghalangi keinginan partai di DPR. Ya jadinya sia-sia saja punya wakil dari berbagai daerah pemilihan, tetapi yang menentukan keputusan akhir tetap saja hanya ketua parpol,” ucapnya.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku masih belum puas atas sikap terbaru dari DPR yaitu memangkas tunjangan dan fasilitas. Pemangkasan tersebut menjadikan anggota DPR mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan setelah dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay (THP) sebesar Rp 65,59 juta.

kata Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan bahwa pemangkasan itu merupakan respons dari tuntutan publik yang digaungkan sejak aksi demonstrasi pekan lalu. Sementara masih banyak tuntutan yang belum mendapat respon.

Dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia lainnya pada pekan kemarin, BEM SI menyuarkan 13 tuntutan. Belasan tuntutan itu mulai dari turunkan tunjangan anggota DPR hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

BEM SI juga memasukkan evaluasi total kabinet Merah Putih hingga kesejahteraan guru dan dosen dalam 13 tuntutan mereka. Muzammil



Komitmen hingga keputusan dari parpol, DPR, hingga presiden sejauh ini bisa kita kategorikan sebagai langkah reaktif untuk meredakan situasi. Jadi sebagai langkah reaktif, keputusan menghapus tunjangan perumahan dan juga penyesuaian tunjangan lain, moratorium kunker, kita bisa memahami,”

LUCIUS KARUS
Peneliti Formappi



Konferensi pers DPR RI menjawab tuntutan 17+8, Jumat (5/9/2025). (YouTube/DPR RI)

mengatakan pihaknya akan melakukan rapat bersama dalam menentukan langkah lanjutan dalam menyikapi sikap terbaru dari DPR.

“Kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan,” jelas Muzammil dilansir detik, Minggu (7/9/2025).

Kondisi ini, lanjut Lucius, diperparah oleh karakter partai politik yang oligarkis dan anti perubahan.

Parpol cenderung dikuasai elite, enggan membuka ruang regenerasi, serta lebih sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Masalah DPR yang kita kritik belakangan ini sesungguhnya adalah masalah ketidakpedulian parpol pada rakyat dan bangsa. Parpol tak menghendaki perubahan, tak menginginkan anggota DPR yang secara sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat,” kata Lucius.

“UU MD3 harus diubah untuk memperkuat DPR sebagai lembaga representasi rakyat, bukan lembaga mainan parpol, apalagi mainan seseorang yang merasa bisa mengendalikan DPR,” jelas Lucius.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat (5/9/2025) malam mengumumkan enam keputusan dalam menjawab tuntutan rakyat, merespons aksi demonstrasi pekan lalu. Pertama dalam kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31

Agustus 2025. Kedua, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

Ketiga, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi, biaya langganan daya listrik dan jasa telepon. Keempat, memangkas biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Kelima, bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan partai politiknya, tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya. Dan keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Demikian dikutip dari Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI, Kamis (4/9/2025), ditandatangani oleh jajaran pimpinan DPR RI. Yaitu, Puan Maharani selaku Ketua, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua, Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua, dan Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua.

Keputusan DPR RI ini muncul di tengah mencuatnya tuntutan 17+8 rakyat. Di mana, salah satu poin dari tuntutan ini adalah mempublikasikan transparansi gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

Selain itu, pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud.

Dengan demikian maka rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI sebagai berikut: Gaji Pokok Rp 4,2 juta; Tunjangan suami/istri pejabat Negara Rp 420 ribu; Tunjangan anak pejabat Negara Rp 168 ribu; Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta; Tunjangan beras pejabat Negara Rp 289,68 ribu; Uang sidang/paket Rp 2 juta. Sehingga, total gaji dan tunjangan melekat adalah Rp 16,7 juta. (han,ist/lut)

Sri Mulyani Sebut Uang Pajak Bakal Langsung Balik ke Rakyat

DAPAT RP5 JUTA-RP12,5 JUTA/ORANG MULAI 2026

Pemerintah menegaskan mulai 2026 setiap warga Indonesia akan merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan. Dicontohkan, Maluku dan Papua Rp12,5 juta, Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta, dan Jawa Rp5,1 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Dana APBN, yang lebih dari 82 persen sumbernya berasal dari penerimaan perpajakan, akan langsung kembali ke masyarakat melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belanja negara melalui belanja K/L dan transfer ke daerah (TKD) menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia," ucap Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, dikutip dari siaran pers, Minggu (7/9/2025).

Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja K/L dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per kapita menunjukkan variasi antarwilayah sesuai karakteristik, tantangan, dan potensi wilayah.

Sumatra memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku-Papua Rp12,5 juta per kapita.

Anggaran tersebut akan membiayai sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cipta Kerja Generasi (CKG). Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas jangkauan perlindungan sosial di berbagai wilayah.

Di Sumatera, alokasi mencakup 18,8 juta penerima MBG, 11,7 ribu siswa Sekolah Rakyat, serta 28,8 juta orang penerima CKG. Kalimantan menerima alokasi bagi 5,2 juta penerima MBG, 5,3 ribu siswa Sekolah Rakyat, dan 7,8 juta penerima CKG. Untuk Sulawesi, terdapat 6,2 juta penerima MBG, 6,3 ribu siswa Sekolah Rakyat, serta 9,5 juta penerima CKG.

Sementara itu, Maluku dan Papua mendapat alokasi untuk 2,4 juta penerima MBG, 3,5 ribu siswa Sekolah Rakyat, dan 3,6 juta orang penerima CKG. Di Bali-Nusa Tenggara, dana mencakup 5,1 juta penerima MBG, 3,1



ribu siswa Sekolah Rakyat, serta 7,0 juta penerima CKG. Jawa, sebagai wilayah dengan populasi terbesar, memperoleh alokasi bagi 45,1 juta penerima MBG, 12,8 ribu siswa Sekolah Rakyat, dan 73,5 juta orang penerima CKG.

Bendahara Negara itu menjelaskan, perbedaan alokasi per kapita ini merupakan strategi redistribusi dan pemerataan. Daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit namun tingkat ketertinggalan lebih

tinggi akan menerima alokasi lebih besar. Dengan begitu, fungsi pajak sebagai instrumen pemerataan benar-benar dijalankan.

Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas dan pelayanan publik lainnya.

Dana ini terdiri antara lain dari Dana Bagi Hasil Rp45,1 triliun, Dana

Alokasi Umum Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp155,1 triliun, Dana Otsus Rp13,1 triliun, Dais DIY Rp0,5 T, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.

Sri Mulyani menekankan, kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk memperhatikan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang salah satunya menopang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.(wid,rls,bis/dya)

Struktur Sekretariat KSSK Dirombak, Fungsinya Ditambah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani merombak organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025.

Aturan yang diteken pada 28 Agustus 2025 tersebut berlaku sejak 4 September 2025. Pada bagian awal regulasi, disebutkan bahwa penataan organisasi dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," bunyi poin kedua bagian menimbang dalam PMK 64 Tahun 2025, dikutip

Minggu (7/9/2025).

Berdasarkan aturan tersebut, Sekretariat KSSK kini menjadi unit organisasi non-eselon di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang secara administratif berada di bawah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebelumnya, posisi sekretariat berada di bawah Sekretaris Jenderal Kemenkeu.

Sekretariat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris KSSK yang dijabat secara ex-officio oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Susunan organisasi juga berubah. Dalam aturan lama, sekretariat diisi oleh Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Divisi Manajemen Kantor, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur tersebut berubah menjadi Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi; Direktorat Asesmen Industri Jasa

Alokasi Belanja K/L & TKDD per Kapita (RAPBN 2026)

Sumatra	Rp 6.5 Juta
Kalimantan	Rp 8.5 Juta
Sulawesi	Rp 7.3 Juta
Jawa	Rp 5.1 Juta
Bali-NTT-NTB	Rp 6.4 Juta
Maluku-Papua	Rp 12.5 Juta

Keuangan Nonbank; Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya; Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum dan Divisi Manajemen Perkantoran.

Sri Mulyani juga mempertegas fungsi Sekretariat KSSK. Beberapa di antaranya merupakan tambahan yang tidak dicantumkan dalam aturan lama..(wid,rls,ist/dya)

ISU PHK MASSAL VIRAL SAAT LABA GUDANG GARAM SUSUT 87 PERSEN

PT Gudang Garam Tbk melaporkan penurunan tajam kinerja keuangan semester I 2025 di tengah kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan buruhnya. Isu tersebut mencuat di media sosial melalui video saat karyawan diberhentikan dan langsung melakukan pamitan.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 30 Juni 2025, perusahaan membukukan laba bersih Rp120,2 miliar, anjlok 87 persen dibanding Rp925,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Turunnya laba terutama disebabkan karena pendapatan perusahaan ikut menurun, sementara biaya produksi tetap tinggi dan utang yang harus dibayar juga besar.

Hingga Juni 2025, Gudang Garam membukukan pendapatan Rp44,36 triliun, turun dari Rp50,02 triliun pada paruh pertama 2024. Biaya pokok pendapatan masih mencapai Rp40,58 triliun, termasuk beban pita cukai dan pajak rokok yang saja sudah Rp32,89 triliun.

Laba bruto perusahaan turun menjadi Rp3,78 triliun dari Rp5,07 triliun. Setelah dikurangi beban usaha Rp3,41 triliun dan beban bunga Rp219,3 miliar, laba sebelum pajak menyusut drastis menjadi Rp294,3 miliar. Usai dikurangi pajak, laba bersih hanya Rp120,2 miliar.

Dari sisi utang, total liabilitas Gudang Garam per 30 Juni 2025 tercatat Rp18,73 triliun, memang lebih rendah dibanding Rp23,02 triliun pada akhir 2024, tetapi masih didominasi utang jangka pendek.

Pinjaman bank jangka pendek mencapai Rp5,2 triliun, mayoritas berasal dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp3,96 triliun, Bank Central Asia (BCA) Rp803 miliar, dan Bank Mandiri Rp436 miliar. Angka ini turun dari Rp9,38 triliun pada akhir Desember 2024.

Selain itu, perusahaan masih menanggung utang usaha Rp611,6 miliar, utang pajak Rp20,9 miliar, serta utang cukai, PPN, dan pajak rokok sebesar Rp8,84 triliun. Ada juga liabilitas jangka pendek lain senilai Rp1,99 triliun, termasuk utang dividen Rp962 miliar dan utang konstruksi Rp418,8 miliar.

Untuk membuat produknya, Gudang Garam harus menanggung biaya bahan baku, upah pekerja, dan biaya lain-lain sebesar Rp6,82 triliun. Beban ini masih ditambah lagi dengan

kewajiban pita cukai dan pajak rokok yang mencapai Rp32,89 triliun, sehingga total biaya produksi membuat keuntungan perusahaan semakin tertekan.

Sementara itu, laba per saham turun tajam menjadi Rp61 per lembar, dibanding Rp481 pada semester I 2024.

Tanda Daya Beli Turun?

Sebelumnya, mencuat kabar adanya PHK massal di pabrik Gudang Garam. Sebuah video yang beredar di medsos, terlihat para karyawan mengenakan seragam merah dan biru bertuliskan PT Gudang Garam mendapat PHK Massal. Mereka dikumpulkan dalam satu aula. Setelah diputuskan diberhentikan kerja, para karyawan langsung melakukan pamitan.

Mitra Produksi di Tuban Membantah

PT Merdeka Nusantara Mitra Produksi Gudang Garam Tuban yang menjadi mitra di Tuban, membantah kabar PHK tersebut. Menurut manajemen, video yang viral itu tidak terjadi di perusahaan mereka. "Sampai dengan saat ini, di pabrik Tuban tidak ada PHK atau sejenisnya," kata Adib Musyafa saat dikonfirmasi, dikutip pada Minggu (6/9/2025).

Pihaknya juga mengaku kaget mengetahui adanya pemberitaan PHK karyawan Gudang Garam di Tuban yang bersumber dari media sosial. Ia bilang, operasional perusahaan masih berjalan seperti biasa. "Saya juga bingung kok ada berita PHK massal karyawan Gudang Garam di Tuban. Padahal, kami di Pabrik Tuban tidak ada PHK karyawan," beber Adib.

Sebelum ramai soal isu PHK karyawan PT Gudang Garam, perusahaan asal Kediri ini memang dikabarkan tengah mengalami masa sulit. Akibat penjualan rokok yang



Foto-foto dari tangkapan layar yang dibagikan akun Instagram @yusufmuhammad isu pabrik rokok PT Gudang Garam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh. Dalam video yang viral di media sosial pada Minggu, (7/9/2025), buruh melakukan perpisahan, menangis dan saling berjabat tangan.

Terlihat beberapa karyawan menangis dan berpelukan karena harus berpisah dengan rekan kerjanya. Belum diketahui secara pasti kapan video tersebut diunggah untuk pertama kali. Namun, tagar Gudang Garam baru menggema di media sosial sejak Sabtu (6/9/2025).

Video haru PHK Massal PT Gudang Garam itu pun banyak tersebar di TikTok dan X hingga membuat warganet berkomentar.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pihaknya masih memverifikasi kabar PHK ribuan buruh di perusahaan tersebut.

"Bila benar terjadi PHK di PT Gudang Garam, ini membuktikan daya beli masyarakat masih rendah sehingga produksi menurun," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/9/2025).

Ia juga menyoroti persoalan pasokan tembakau yang terbatas, minimnya inovasi produk, serta kenaikan cukai yang memberatkan industri. Said khawatir PHK buruh

Gudang Garam dapat berdampak berantai ke sektor tembakau, logistik, pedagang kecil, hingga supplier.

"Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan," katanya.(wid,rls,ant,bis/dya)

PROFIL SINGKAT PT GUDANG GARAM DALAM POIN-POIN:

- o **1956:** Didirikan oleh Tjoa Ing-Hwie (Surya Wonowidjojo) di Kediri, Jawa Timur, memproduksi kretek merek Inghwie dengan 50 pekerja.
- o **1958:** Resmi bernama Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam.
- o **1966:** Menjadi produsen sigaret kretek tangan (SKT) terbesar di Indonesia.
- o **1971:** Berubah status menjadi perseroan terbatas (PT).
- o **1973:** Mulai ekspor produk ke luar negeri.
- o **1979:** Mengadopsi mesin rokok, kapasitas produksi naik hingga 17 miliar batang/tahun.
- o **1980-an:** Operasikan pabrik 240 hektare, mempekerjakan >37 ribu karyawan, kuasai 38% pasar nasional, kontribusi cukai > Rp 1 miliar/tahun, dan aktif CSR di tenis meja.
- o **1990:** Tercatat di Bursa Efek Jakarta & Surabaya (27 Agustus), mayoritas saham tetap dikendalikan keluarga Wonowidjojo.
- o **1990-an:** Jadi konglomerasi terbesar ke-5 di Indonesia, relatif tahan krisis 1997-1998.
- o **2017:** Kuasai 21% pangsa pasar rokok nasional, Japan Tobacco akuisisi dua anak usaha (PT Karyadibya Mahardika & PT Surya Mustika Nusantara).
- o **2021:** Masuk bisnis rokok elektrik, bentuk tiga anak usaha.
- o **2022:** Dirikan PT Surya Kerta Agung (jalan tol) & PT Surya Dhoho Investama (investasi Rp 1 triliun untuk Bandara Dhoho Kediri).

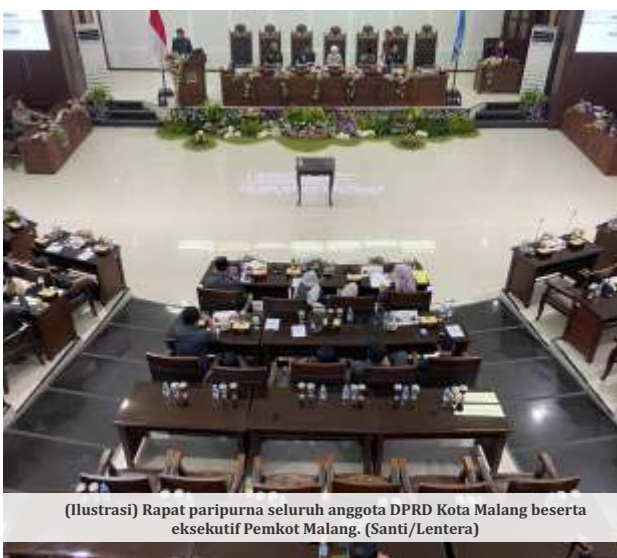


PT. GUDANG GARAM Tbk.

Siyamin pada 21 Juni 2025 lalu.

Ia membeberkan, ada beberapa alasan Gudang Garam berhenti menghentikan pembelian tembakau petani Temanggung. Penyebab pertama adalah stok yang masih melimpah.(wid,rls,ist/dya)

KETUA DPRD KOTA MALANG TEPIS ADANYA KENAIKAN TUNJANGAN



(Ilustrasi) Rapat paripurna seluruh anggota DPRD Kota Malang beserta eksekutif Pemkot Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menepis adanya kenaikan tunjangan yang diterima oleh pimpinan maupun anggota DPRD Kota Malang. Ditegaskan, seluruh komponen tunjangan yang ada, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Wali (Perwal) Kota Malang.

Penegasan ini disampaikan Amithya menanggapi kebijakan

pemerintah pusat yang telah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, terkait penghapusan tunjangan perjalanan ke luar negeri. Ia menekankan, DPRD Kota Malang sejak awal tidak memiliki komponen tunjangan tersebut.

"Kami gak ada tunjangan ke luar negeri," ujar perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, dikutip pada Minggu (7/9/2025).

Meski total tunjangan yang diterima anggota DPRD sudah memiliki hitungannya masing-masing, Mia kembali menegaskan tidak ada komponen perjalanan ke luar negeri di dalamnya.

"Semua mengacu pada Peraturan Pemerintah. Jadi semuanya bisa membaca, melihat di sana. Bahkan kalau mau melihat satuannya itu ada semuanya di websitenya Pemkot Malang yang berkaitan tentang

anggaran itu," jelasnya.

Untuk diketahui, sebagai dasar hukum, Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD.

Komponen tersebut meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain.

Selain itu, terdapat pula penghasilan yang pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, yakni tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Di Kota Malang, seluruh anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD telah diatur dalam Perwal Kota Malang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada 27 Desember 2024.

Perwal tersebut mencakup belanja uang representasi DPRD, tunjangan keluarga, tunjangan beras, hingga belanja uang jasa pengabdian.

Lebih lanjut, disinggung terkait tunjangan pajak yang sempat disampaikan Kementerian Keuangan, Mia memastikan DPRD Kota Malang juga tidak mendapatkan fasilitas tersebut. "Kalau kami tidak ada tunjangan pajak," tegasnya.

Mia menambahkan, termasuk untuk komponen Pajak Penghasilan (PPh21), DPRD Kota Malang tidak menerimanya. Menurutnya, fasilitas tersebut hanya berlaku di DPR RI, sementara di tingkat kota atau kabupaten mekanismenya berbeda.

"Itu mungkin di DPR RI. Kalau di kami tidak ada. Kan beda. Kami ini seperti ASN," paparnya.

Ia juga menegaskan, justru potongan pajak yang diterima anggota DPRD Kota Malang cukup besar. Terlebih setelah diberlakukannya skema pajak tarif efektif rata-rata (TER) yang menyebabkan potongan pajak semakin signifikan. "Itu sebenarnya besar banget. Banyak potongannya," katanya.

"Jadi tidak ada (kenaikan tunjangan). Bahkan berkurang. Kan kena efisiensi. Kami kemarin efisiensi 50,1 persen. Itu tertinggi di seluruh Kota Malang," pungkasnya. (Santi/Dya)

Turnamen Tenis NU Cup III 2025

WALI KOTA BATU TEKAN SEMANGAT PENGEMBANGAN SPORT TOURISM

BATU - Turnamen Tenis NU Cup III Piala Wali Kota Batu 2025 resmi bergulir dengan dibukanya ajang tahunan tersebut oleh Wali Kota Batu, Nurochman, pada Sabtu (6/9/2025). Dalam kesempatan itu, Cak Nur, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya semangat pengembangan sport tourism sebagai bagian dari program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.

Cak Nur juga menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Batu yang konsisten menyelenggarakan turnamen tenis hingga memasuki musim ketiga.

"Atas nama Pemkot Batu, saya sampaikan apresiasi kepada PCNU Kota Batu yang telah konsisten menyelenggarakan kegiatan ini sampai dengan season ketiga," ujar Cak Nur.

Menurutnya, konsistensi hingga tahun ketiga, ini menjadi bukti nyata kegiatan olahraga dapat berjalan beriringan dengan agenda kebersamaan dan keagamaan. "NU biasanya kita kenal dengan (kegiatan) seperti tahlil, istighosah, atau sholawatan. Namun kini ada turnamen tenis yang menjadi ciri khas NU urban," jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Nur menekankan turnamen ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana silaturahmi dan rekreasi. "Selain berkompetisi secara positif, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi. Silakan menikmati keindahan dan kesejukan Kota Batu," tuturnya.

Ditegaskannya, penyelenggaraan turnamen ini sejalan dengan program sport tourism yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Menurutnya, pemerintah ingin seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam mendukung olahraga sekaligus pariwisata.

"Ini menjadi salah satu titik tekan kami. Pemkot memiliki program sport tourism, dan di sinilah kami ingin semua elemen terlibat. Kami juga akan memfasilitasi, sehingga harapannya semua akan sehat dengan olahraga," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Turnamen Tenis NU Cup III 2025, Fatkhul Yasin, menjelaskan turnamen ini terlaksana berkat dukungan penuh PCNU Kota Batu.

Ia menyebut, kegiatan ini tidak hanya untuk memasyarakatkan

olahraga, tetapi juga mendukung visi besar Wali Kota Batu dalam menjadikan olahraga sebagai bagian dari kreativitas pariwisata. "Meski bukan jalur yang biasanya melekat di NU, kami bertekad untuk terus mendukung dan memasyarakatkan olahraga di Kota Batu," ungkap Yasin.

Tahun ini, disebutkannya, jumlah peserta meningkat tajam. Tercatat sebanyak 126 peserta, terdiri dari 72 peserta di kelas A dan 54 peserta di kelas B. Pertandingan dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yakni venue utama yang berlokasi di lapangan tenis Hotel Agro Kusuma, lapangan tenis Jambuluwuk, dan lapangan tenis Panorama.

"Tenis bisa dimainkan oleh siapapun, bukan milik kalangan tertentu. Di turnamen ini kami menggunakan sistem setengah kompetisi. Untuk juara pertama kelas



Wali Kota Batu, Nurochman melakukan lemparan pertama pada pembukaan Turnamen Tenis NU Cup III 2025, Sabtu (6/9/2025). (Santi/Lentera)

A, hadiah yang diperebutkan senilai Rp5 juta," terangnya.

Di sisi lain, Ketua PCNU Kota Batu, Takim, menekankan turnamen ini tidak hanya sebatas kompetisi, melainkan juga sarana memperkuat persatuan. Terlebih, momentum pelaksanaannya masih berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. (Santi/Dya)

RAJA SAHKAN ANUTIN CHARNVIRAKUL SEBAGAI PM THAILAND



Pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul melambaikan tangan setelah terpilih sebagai perdana menteri baru Thailand oleh Mahkamah Konstitusi di Bangkok, Thailand, Jumat (5/9/2025). (Foto: reuters)

Pengusaha besar di bidang konstruksi, Anutin Charnvirakul, resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand setelah terpilih dalam pemungutan suara. Ia mulai menjalankan tugasnya sebagai PM usai memperoleh pengesahan dari Raja.

“Yang Mulia Raja telah mendukung Bapak Anutin Charnvirakul untuk menjadi Perdana Menteri mulai sekarang,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Rendah Parlemen Thailand, Arpath Sukhanunth, saat membacakan perintah kerajaan dalam sebuah upacara di kantor pusat Partai Bhumjaithai milik Anutin di Bangkok, dilansir AFP, Minggu (7/9/2025).

Anutin (58) sebelumnya menjabat di berbagai posisi pemerintahan Thailand, beberapa diantaranya, sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Namun ia mungkin paling terkenal sebagai perancang dekriminalisasi ganja Thailand pada tahun 2022.

Ia menjadi pemimpin ketiga kerajaan dalam dua tahun, tetapi telah mengambil alih kekuasaan dengan dukungan koalisi dengan syarat pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan untuk mengadakan pemilihan umum baru.

Anutin menggulingkan partai Pheu Thai yang berhaluan populis dari klan Shinawatra, yang telah memonopoli jabatan tertinggi sejak pemilu 2023, di

mana mantan PM Thailand sebelumnya, Paetongtarn Shinawatra, dipecat oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika.

Selain itu, Anutin Charnvirakul

berjanji tidak ada aksi pilih kasih ataupun “balas dendam” selama dirinya menjabat sebagai kepala pemerintahan negara tersebut.

Anutin juga menyebut dirinya

Kontroversi Industri Ganja Akankah Reda?

INDUSTRI ganja Thailand optimistik bangkit kembali di bawah kepemimpinan Perdana Menteri baru, Anutin Charnvirakul, tokoh yang dulu mendorong dekriminalisasi. Kepulangannya ke kursi kekuasaan menenangkan kekhawatiran soal kemungkinan ganja dikategorikan lagi sebagai narkoba.

Industri ini melewati masa-masa penuh gejolak akibat perubahan kebijakan dan dinamika politik. Pada 2022, saat Anutin menjabat Menteri Kesehatan, ganja didekriminalisasi, menjadikan Thailand pelopor di Asia.

Namun, ketiadaan aturan ganja yang menyeluruh menyebabkan regulasi berjalan tidak konsisten, sementara pemerintahan selanjutnya sempat menimbang untuk mengembalikan larangan penggunaan rekreasional.

Dengan kembalinya Anutin dan Partai Bhumjaithai ke tampuk pemerintahan, para pelaku industri yakin iklim politik akan lebih mendukung. “Rencana mengklasifikasikan kembali ganja sebagai narkoba tampaknya tidak akan terjadi setelah Bhumjaithai berkuasa,” kata Prasitchai Nunual,

Sekjen kelompok advokasi Writing Thailand’s Cannabis Future.

Sejak Anutin menjadi perdana menteri, para pejabat bersikap lebih ramah dan berbicara lebih positif. Itu perubahan yang nyata.

Pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai, telah berupaya membatasi ganja hanya untuk penggunaan medis, dengan mewajibkan resep dokter. Mantan perdana menteri Srettha Thavisin dan Paetongtarn Shinawatra sempat mempertimbangkan reklasifikasi sebelum akhirnya memutuskan.

Beberapa bulan sebelum kepulangan Anutin, pihak berwenang mengintensifkan tindakan keras, menutup apotek, mencabut izin, dan memeriksa ribuan toko. Para pejabat juga mengintensifkan upaya pemberantasan penyelundupan, menyusul laporan pengiriman yang menuju berbagai tujuan, termasuk Inggris, India, dan Hong Kong.

Bagi bisnis, ketidakpastian yang terus-menerus ini merugikan. “Lingkungan kebijakan yang tidak dapat diprediksi telah mempersulit bisnis legal sekalipun untuk tetap

akan menjalankan pemerintahannya yang singkat dengan saksama hingga Thailand menggelar pemilu selanjutnya.

“Saya akan mematuhi semua kesepakatan,” kata Anutin Charnvirakul pada Jumat (5/9/2025) di luar kantor pusat partainya.

“Kita harus mengembalikan semangat ‘Negeri Senyum’ ke negara kita selama masa jabatan saya yang singkat,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia dikenal tidak menyukai konflik. (AFP, CNN, ist/nei)

PROFIL ANUTIN CHARNVIRAKUL

- **Nama Lengkap:**
Anutin Charnvirakul
- **Tanggal Lahir:**
13 September 1966, Bangkok, Thailand
- **Pendidikan:**
 - Sarjana Teknik Industri, Hofstra University (AS)
 - Mini MBA, Universitas Thammasat
- **Karier Awal:**
 - Production Engineer, Mitsubishi (AS)
 - Analis teknis, Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)
 - Managing Director, Sino-Thai Engineering & Construction
- **Awal Politik:**
 - 1996: Penasihat Kementerian Luar Negeri
 - 2004–2006: Wakil Menteri Kesehatan & Wakil Menteri Perdagangan
 - 2005–2006: Wakil Menteri Kesehatan
- **Larangan Politik:**
2007–2012 tidak aktif berpolitik akibat pembubaran Partai Thai Rak Thai
- **Partai Politik:**
Ketua Partai Bhumjaithai sejak 2012
- **Jabatan Publik:**
 - 2019–2023: Wakil Perdana Menteri & Menteri Kesehatan
 - 2023–Juni 2025: Wakil Perdana Menteri & Menteri Dalam Negeri
 - September 2025: Perdana Menteri Thailand
- **Kebijakan Penting:**
 - Dekriminalisasi ganja (2022)
 - Penanganan pandemi COVID-19
- **Ciri Khas:**
Dijuluki “Cannabis King” karena peran besar dalam legalisasi ganja di Thailand
- **Aktivitas Lain:**
Pilot sukarelawan (Hearts With Wings), kolektor jimat Buddha

bertahan,” kata Rattapon Sanrak, pemilik Highland Cafe di distrik Khaosan, Bangkok. Ia menambahkan bahwa biaya budidaya yang lebih tinggi dan persyaratan resep dokter telah mendorong banyak operator untuk beroperasi secara ilegal.

Meskipun industri mengharapkan pelanggaran penegakan hukum, para pegiat tetap waspada. Dengan pemerintahan Anutin yang diperkirakan hanya akan bertahan sebentar, penyelesaian yang langgeng terkait regulasi ganja mungkin bergantung pada pemilu berikutnya. (businessday, Bloomberg, ist/nei)

Tren Cortisol Cocktail

Minuman untuk Redakan Stres

Saat ini, media sosial tengah diramaikan dengan tren minuman bernama cortisol cocktail. Minuman tersebut populer karena dipercaya dapat membantu menurunkan stres khususnya kadar hormon kortisol—serta meningkatkan energi tubuh.

Cortisol cocktail ini menjadi minuman yang dipercaya dapat menurunkan kadar hormon kortisol yang tinggi dan membantu mengatasi apa yang disebut sebagai adrenal fatigue atau kelelahan kelenjar adrenal.

Apa Itu Kortisol?

Dilansir dari laman Independent.co.uk, kortisol sering disebut sebagai “hormon stres”. Namun sebenarnya, tubuh manusia tetap membutuhkan hormon kortisol. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal yang juga menghasilkan adrenalin, hormon seks, dan aldosteron, yakni zat yang membantu mengatur keseimbangan garam serta tekanan darah.

Produksi kortisol dikendalikan otak sebagai respons terhadap stres, baik fisik maupun psikologis. Misalnya saat kurang tidur, terluka, menghadapi tekanan kerja, atau sedang berduka. Pada kondisi ini, kortisol meningkat untuk memicu respons fight or flight.

Selain berperan dalam menghadapi stres, kortisol juga penting dalam mengatur metabolisme, menambah gula darah sebagai sumber energi, serta mengurangi peradangan. Kadarnya berubah mengikuti siklus harian, seperti kadarnya akan tinggi di pagi hari, turun pada sore hari, dan rendah di malam hari.

Kortisol tinggi justru diperlukan saat bangun tidur atau dalam kondisi genting. Sebaliknya, kadar rendah dibutuhkan di malam hari agar bisa tidur nyenyak. Sehingga anggapan bahwa kortisol selalu buruk tidak sepenuhnya tepat.

Cara Membuat

Dikutip dari SiPhox, membuat cortisol cocktail tidak memerlukan bahan khusus karena semua bahan bisa ditemukan dengan mudah di supermarket biasa atau mungkin sudah tersedia di dapur rumah. Berikut langkah-langkah pembuatannya.

Siapkan bahan utama berupa 120 mililiter jus jeruk segar, seperempat sendok teh garam laut atau garam Himalaya merah muda, dan seperempat sendok teh cream of tartar.

Tuangkan semua bahan ke dalam gelas, lalu aduk hingga tercampur rata. Minuman ini juga harus segera diminum, sebaiknya dalam waktu 30 menit setelah bangun tidur. Gunakan jus jeruk perasan segar agar kandungan vitamin C lebih maksimal atau pilih jus kemasan tanpa tambahan gula.

Pilihan Variasi

Untuk mengurangi asupan gula, ganti jus jeruk dengan 240 mililiter air kelapa dan tambahkan bubuk vitamin C seperempat sendok teh. Alternatif lain, gunakan 240 mililiter air dengan perasan setengah buah lemon, lalu campurkan bubuk vitamin C dan garam. Bagi yang suka rasa segar alami, buat versi hijau dengan mencampurkan jus mentimun, jus seledri, perasan lemon, garam, dan bubuk vitamin C.

Ada juga variasi tambahan yang bisa dicoba. Beberapa orang menambahkan cream of tartar untuk meningkatkan asupan kalium atau jahe untuk membantu pencernaan sekaligus memberi sensasi hangat. Ada pula yang mencampurkan suplemen kesehatan, seperti kolagen, yang dikenal sebagai protein pembentuk jaringan.

Meski begitu, penggunaan suplemen sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan dokter. Tidak semua suplemen cocok untuk kondisi kesehatan tertentu dan sebagian bisa berinteraksi dengan obat yang sedang dikonsumsi.

Dikutip dari laman WebMD, klaim kesehatan minuman ini didasarkan pada kandungan vitamin C dari jus jeruk, kalium dari air kelapa, magnesium tambahan, dan natrium dari garam. Vitamin C memang berperan penting dalam fungsi kelenjar adrenal, sedangkan kalium diperlukan untuk kesehatan sel dan menjaga detak jantung.

Magnesium berfungsi dalam produksi energi dan kerap berkurang pada kondisi stres kronis. Namun, klaim bahwa natrium baik untuk kortisol dan kelenjar adrenal tidak sesuai bukti ilmiah. Asupan garam berlebih justru dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis dan terbukti meningkatkan kadar kortisol.

Risiko Gula dan Garam

Meski mengandung vitamin dan mineral penting, minuman ini tidak terbukti secara langsung seketika signifikan menurunkan kadar hormon kortisol. Sebaliknya, ia menyimpan risiko karena kandungan gula dan garam yang tinggi. Satu porsi cortisol cocktail memiliki sekitar 16 gram gula yang setara dengan sepertiga dari batas harian yang dianjurkan. Namun bagi penderita diabetes, kadar gula ini bisa berbahaya. Dengan seperempat sendok teh garam, minuman ini juga mengandung seperempat dari batas harian natrium sehingga apabila dikonsumsi berlebihan dapat memperburuk tekanan darah tinggi.

Cara Kerja Kortisol

Dikutip dari laman Houston Methodist, dalam situasi tertekan tubuh

melepaskan kortisol setelah hormon “fight or flight” seperti adrenalin dilepaskan. Kortisol kemudian merangsang pelepasan glukosa dari hati untuk menyediakan energi cepat agar tubuh tetap siaga. Selain itu, kortisol memengaruhi metabolisme dengan mengatur cara tubuh menggunakan gula untuk energi. Hormon ini menginstruksikan pankreas menurunkan produksi insulin sekaligus meningkatkan glukagon sehingga kadar gula darah tetap tersedia.

Ketidakeimbangan Kortisol

Dikutip dari News-Medical.Net, kadar kortisol yang terlalu tinggi bisa menimbulkan sindrom Cushing, ditandai dengan penambahan berat badan pada wajah dan perut, munculnya lemak di punggung atas, tekanan darah tinggi, hingga kadar gula darah meningkat. Sebaliknya, kadar kortisol yang terlalu rendah dikenal sebagai insufisiensi adrenal. Kondisi ini bisa muncul akibat penyakit Addison, (nei,ist/dya)



STUDI: SIKAT GIGI LEBIH EFEKTIF JIKA TIDAK LANGSUNG KUMUR



Kebiasaan berkumur setelah menyikat gigi sudah dilakukan oleh banyak orang karena dianggap membuat gigi terasa lebih bersih dan segar. Namun, tanpa disadari, tindakan ini justru dapat mengurangi efektivitas manfaat dari menyikat gigi itu sendiri.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa berkumur setelah menyikat gigi dapat menurunkan efektivitas fluoride, mineral yang berperan melindungi gigi dari kerusakan. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan agar pasta gigi cukup dilepaskan tanpa dibilas dengan air, sehingga fluoride dapat bertahan lebih lama pada permukaan gigi.

Dikutip dari ZME Science pada Kamis (4/9/2025), fluoride membantu memperbaiki mineral dan kalsium yang hilang dari gigi setiap

kali kita mengonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam. Zat ini juga memperkuat enamel, lapisan putih di permukaan gigi, serta memiliki efek antimikroba terhadap bakteri penyebab karies kerusakan permanen pada gigi yang biasanya berujung pada berlubang.

Namun manfaat ini hanya optimal jika fluoride bisa tinggal lebih lama di mulut. Sebab paparan fluoride akan terus menurun sepanjang hari akibat aktivitas seperti makan dan minum. Berkumur setelah gosok gigi bisa menghilangkan sisa fluoride dari mulut lebih cepat.

Penelitian dari Universitas Göteborg, Swedia, menguji dampak berkumur dengan volume air berbeda setelah menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride. Hasilnya, berkumur sebanyak tiga kali dengan

air 10 mL- sama dengan sekitar 2 sendok teh terbukti menurunkan kadar fluoride lebih signifikan dibanding hanya sekali kumur dengan 5 mL air atau satu sendok teh.

Sisa Pasta Gigi Tertelan

Pertanyaan lain muncul: apakah sisa fluoride berbahaya jika tak sengaja tertelan? Studi tahun 2023 menunjukkan bahwa 30 menit setelah hanya melepeh pasta gigi tanpa berkumur, tidak ditemukan kandungan fluoride dalam darah yang menunjukkan efek toksik.

Saran untuk tidak berkumur setelah sikat gigi ini juga telah disampaikan oleh berbagai otoritas kesehatan gigi di dunia. Di Inggris, National Health Service (NHS) secara resmi menyarankan agar orang-orang "meludahkan sisa pasta gigi dan tidak berkumur setelah menyikat gigi."

Hal serupa juga ditegaskan oleh American Dental Association (ADA) yang menyarankan agar sisa pasta gigi cukup dibuang tanpa perlu menggunakan air.

Kebiasaan dari Kecil

Meski begitu, mengubah kebiasaan berkumur setelah sikat gigi memang tidak mudah, terutama bagi yang terbiasa sejak kecil. Anak-anak pun biasanya diajarkan berkumur untuk mencegah risiko menelan pasta gigi.

Namun, sisa pasta gigi di mulut

tidak dianggap kotor selama sisa makanan ikut terbuang, dan kebersihan bisa dilengkapi dengan dental floss. Studi soal anjuran tidak berkumur masih bersifat opsional, bahkan menurut drg. Rosdiana Nurul Annisa, berkumur tetap boleh dilakukan setidaknya sekali karena hasil penelitian tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

"Berdasarkan jurnal dan penelitian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara berkumur sekali setelah sikat gigi dan tidak berkumur setelah sikat gigi," kata Rosdiana dikutip dari Antara.

Dokter gigi Dewi Isroyati dari UI menilai berkumur setelah sikat gigi di Indonesia masih penting, karena tidak semua pasta gigi mengandung fluoride. Ia menekankan bahwa yang lebih utama adalah teknik menyikat gigi yang benar menggunakan sikat berbulu halus selama minimal dua menit.

"Yang lebih penting adalah waktu sikat gigi, teknik sikat gigi yang benar dan kontrol ke dokter gigi enam bulan sekali," katanya. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI



Rahasia Samarkan Kantung Mata dengan Cepat

Kantung mata yang besar dan gelap sering kali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Terlebih ketika harus tampil di depan banyak orang atau menghadiri acara penting, bagian bawah mata yang tampak menonjol dapat memberi kesan lelah serta membuat wajah terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Lingkaran hitam yang muncul pun kerap menambah kesan kurang segar pada penampilan.

Kantung mata umumnya muncul akibat gabungan berbagai faktor, seperti kurang tidur, stres, maupun proses penuaan alami. Seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit berkurang sehingga jaringan di sekitar mata menjadi lebih lemah. Hal ini menyebabkan lemak yang berfungsi menopang area mata bergeser dan akhirnya membentuk kantung.

Kompres Dingin

Suhu dingin mampu mengecilkan pembuluh darah dan menurunkan peradangan, sehingga area bawah mata terlihat lebih segar. Cukup bungkus es batu dengan kain tipis atau gunakan sendok yang sudah didinginkan di freezer, lalu tempelkan beberapa menit di area mata.

Selain membuat mata terasa rileks, metode ini juga bisa langsung memberikan efek instan yang terlihat. Metode ini cocok digunakan saat sedang terburu-buru dan ingin tampil segar. Kompres dingin ini bisa dilakukan kapan saja, baik di pagi hari

setelah bangun tidur atau sebelum tidur malam.

Atur Pola Tidur

Kurang tidur menjadi salah satu penyebab utama munculnya kantung mata dan lingkaran gelap. Saat tubuh tidak mendapat istirahat yang cukup, kulit akan tampak kusam, dan aliran darah di bawah mata lebih terlihat. Akibatnya, area bawah mata tampak lebih gelap dan bengkak.

Untuk itu, penting sekali menjaga pola tidur minimal 7-8 jam setiap malam. Tidur yang berkualitas akan membantu proses regenerasi kulit, termasuk memperbaiki sel-sel di area mata. Selain itu, tidur cukup juga bisa membuat tubuh lebih bertenaga dan wajah terlihat lebih cerah secara alami.

Cover dengan Concealer

Concealer dirancang khusus untuk menutupi noda, warna gelap, maupun kantung mata yang membuat wajah terlihat lelah. Dengan teknik pengaplikasian yang tepat, concealer bisa membuat wajah tampak lebih segar seketika. Pilih concealer dengan warna satu tingkat lebih terang dari kulitmu untuk menyamarkan lingkaran hitam secara natural.

Jangan lupa gunakan beauty blender atau jari untuk meratakan produk agar hasilnya tidak terlihat tebal atau pecah di bawah mata. Meski concealer bisa jadi solusi instan, jangan lupa bahwa ini hanya menutupi, bukan mengatasi masalah.

Kurangi Konsumsi Garam

Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat membuat tubuh menahan cairan berlebih, termasuk di area sekitar mata. Hal inilah yang sering menyebabkan kantung mata tampak lebih bengkak dari biasanya. Maka dari itu, mengurangi asupan garam bisa menjadi langkah sederhana tapi efektif untuk menjaga area bawah mata tetap segar. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan segar yang lebih menyehatkan. Tubuh pun akan terasa lebih ringan, dan wajah tampak lebih cerah.

Rutin Pijat Lembut di Area Mata

Pijatan lembut di area mata bisa membantu melancarkan sirkulasi darah sekaligus mengurangi cairan yang menumpuk. Dengan begitu, kantung mata tampak lebih kecil dan area hitam berangsur memudar. Gunakan ujung jari manis untuk memijat perlahan dari bagian dalam ke luar bawah mata. Lakukan gerakan ringan selama beberapa menit, bisa ditambah dengan eye cream atau minyak alami seperti minyak almond agar pijatan terasa lebih lembut. Pijatan ini tidak hanya menyamarkan kantung mata tetapi juga membantu menjaga elastisitas kulit di sekitar mata.

Batasi Alkohol dan Kafein

Konsumsi alkohol dan kafein secara berlebihan dapat memicu dehidrasi, yang pada akhirnya

berdampak pada kesehatan kulit. Kondisi ini juga dapat mengganggu kualitas tidur, sehingga tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan diri. Dampaknya, kantung mata dan lingkaran hitam akan terlihat lebih jelas, membuat wajah tampak lelah.

Penuhi Kebutuhan Cairan Tubuh

Minum air putih dalam jumlah yang cukup berperan penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi serta mencegah munculnya kantung mata. Asupan cairan yang seimbang membantu memperlancar sirkulasi dan mendukung proses regenerasi sel, sehingga kulit tetap sehat. Selain itu, penting untuk membatasi konsumsi makanan olahan dengan kadar garam tinggi. Kandungan garam berlebih dapat memicu retensi cairan, yang justru memperburuk kondisi kantung mata dan membuat wajah terlihat bengkak.

Gunakan Kantung Teh

Menempelkan kantung teh dingin ke mata juga dapat menjadi cara menghilangkan kantung mata hitam. Pasalnya, teh mengandung kafein dan antioksidan yang dapat membantu merangsang sirkulasi darah, mengecilkan pembuluh darah, dan mengurangi retensi cairan di bawah kulit. Rendam dua kantung teh hitam atau hijau dalam air panas selama lima menit. Biarkan mereka dingin di lemari es. (nei,ist/dya)

Korupsi Chromebook ...dari hal 1

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) sekaligus Doktor Hukum di Universitas Indonesia dengan fokus pada tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, mengatakan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook berpotensi melibatkan pihak lain. Yenti mengatakan, aspek pengawasan dalam proyek yang dijalankan suatu kementerian tertentu merupakan tugas dari Inspektorat Jenderal (Irjen) kementerian tersebut.

Ia mempertanyakan kinerja Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang terkesan melakukan pembiaran atas pelanggaran hukum yang terjadi pada proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut. Sehingga menyebabkan kasus korupsi itu terlambat terungkap.

"Selain itu, tidak kalah pentingnya bagaimana pengawasan, mengapa seperti ada pembiaran sehingga pelanggaran hukum terus terjadi dan tidak terendus, bagaimana kinerja irjen kementerian sehingga sangat terlambat terungkap," kata Yenti, dilansir *Tribunnews.com*, Minggu (7/9/2025).

Sehingga, ia menuturkan, asas hukum pidana mengenai adanya penyertaan pelaku harus dijadikan acuan untuk pengembangan kasus ini. "Dimana semua orang yang terlibat harus bertanggungjawab secara pidana," jelasnya.

Yenti menjelaskan, dalam konteks seorang menteri ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, maka harus dikembangkan ke atas yakni Presiden, ke samping yaitu pihak ketiga swasta yang mendapatkan tender, bahkan pihak yang menikmati keuntungan, dan ke bawah yang pada umumnya adalah bawahan menteri yang melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, kata Yenti, sebelum mengaitkan dengan TPPU, harus disampaikan asas penting dalam perkara korupsi yaitu, status tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi tidak harus mendapatkan keuntungan.

Ia menjelaskan, rumusan pelaku korupsi salah satunya adalah 'menguntungkan dirinya atau orang lain'. "Jadi para pejabat terutama, jangan merasa aman hanya karena merasa tidak mendapatkan keuntungan," kata Yenti.

"Kejaksaan harus juga menjerat siapapun yang ikut menikmati hasil korupsi meskipun tidak terlibat korupsi sebagai pelaku TPPU pasif yang ancaman pidananya maksimum 5 tahun, dirampas semua harta yang

didapat dari korupsi ini," pungkasnya.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan, Nurcahyo Jungkung Madyo, menceritakan keterlibatan Nadiem dalam kasus ini. Awalnya, Nadiem menggelar rapat 'senyap' dengan pihak Google Indonesia terkait pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menggunakan Chromebook. Dalam rapat tertutup secara daring melalui Zoom Meeting itu, Nadiem mewajibkan peserta memakai headset.

"Zoom Meeting dan meminta peserta memakai headset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM," kata Nurcahyo.

Rapat yang digelar 6 Mei 2020 itu diikuti Dirjen Paud Dikdasmen berinisial H, Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek berinisial T, serta JT dan FA selaku stafsus Nadiem.

Rapat itu digelar padahal pengadaan Chromebook belum dimulai. Untuk meloloskan itu, sekitar awal 2020 Nadiem menjawab surat Google untuk pengadaan Chromebook ini.

"Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google Kemendikbud. Sekitar awal 2020, NAM selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi pengadaan alat TIK di Kemendikbud," katanya.

Nurcahyo menyebutkan tawaran Google sebelumnya ditolak era Mendikbud Muhadjir Effendy karena uji coba gagal tahun 2019 dan tak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam.

"Atas perintah NAM pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu ChromeOS," ujar Nurcahyo.

Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi ChromeOS.

Akibat perbuatannya itu, Nadiem melanggar Perpres 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun 2021, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan

peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan LKPP 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

Sementara, tersangka Jurist Tan diduga sudah merencanakan penggunaan laptop Chromebook sebagai pengadaan TIK tahun anggaran 2020-2022 di Kemendikbud sejak Agustus 2019. Dia menyebut Jurist membuat grup Whatsapp terkait hal itu, bahkan sebelum Nadiem Makarim dilantik sebagai Mendikbudristek.

Jurist diduga melobi pihak terkait agar Ibrahim Arief dijadikan konsultan pada Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Pada Februari dan April 2020, Nadiem disebut sempat bertemu pihak Google untuk membicarakan rencana pengadaan Chromebook tersebut.

Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS di antaranya juga saat itu dibahas adanya co-Investment sebanyak 30% dari Google untuk Kemendikbudristek.

Di satu sisi, Kapuspenkum Kejaksaan Anang Supriatna menyebut Jurist Tan telah menjadi buron dan sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Pihak Polri pun telah meneruskan permohonan red notice ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Kini Polri menunggu penerbitan red notice oleh Interpol.

Pihak Kejaksaan mengatakan Jurist tidak berada di Indonesia. Dia sudah berulang kali dipanggil untuk pemeriksaan namun tidak memenuhinya.

"Yang kita tahu satu orang JT, yang bersangkutan tidak ada di Indonesia dan sudah beberapa kali dipanggil dalam kapasitas sebagai sanksi tidak mengindahkan," kata Kapuspenkum Kejaksaan Harli Siregar dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan, Selasa Malam (16/7/2025).

"Kami sudah melakukan DPO tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir tanah air," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Abdul Qohar dalam kesempatan yang sama.

Terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipras) Agus Andrianto mengatakan paspor Jurist Tan sudah dicabut sejak 4 Agustus 2025 sesuai permintaan Kejaksaan.

"Sejak tanggal 4 Agustus (paspor Jurist Tan telah dicabut) sesuai permintaan Kejaksaan RI," ujar Agus, Rabu (13/8/2025), dikutip dari detiknews.

Sementara itu, peran Ibrahim Arief disebut telah mengarahkan tim

teknis untuk mengeluarkan hasil kajian teknis Chrome OS. Pada 17 April 2020, Ibrahim diduga mempengaruhi tim teknis dengan mendemonstrasikan Chromebook pada meeting via Zoom yang saat itu dipimpin Nadiem secara langsung.

Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS di antaranya juga saat itu dibahas adanya co-investment sebanyak 30 persen dari Google untuk Kemendikbudristek.

Sedangkan, Sri Wahyuningsih diduga meminta tim teknis menyelesaikan hasil kajian teknis terkait pengadaan laptop tersebut. Dia juga diduga memerintahkan untuk menggunakan Chrome OS yang saat itu belum ada pengadaannya.

Lalu, Sri juga diduga meminta timnya untuk memilih sistem Chrome OS dengan metode e-katalog. Pada 30 Juni 2020, Sri diduga sempat mengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Hadi Waluyo dengan Wahyu Hariadi karena dianggap tidak sanggup melaksanakan perintah Nadiem.

Pada tanggal yang sama, 30 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Sri memerintahkan Wahyu Hariadi selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi sistem informasi pengadaan sekolah dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek untuk sekolah dasar sebanyak 15 unit laptop dan kolektor 1 unit per sekolah dengan harga Rp 88.250.000 dari Persatuan Pendidikan Kemendikbudristek.

Selanjutnya, Sri diduga membuat petunjuk pelaksanaan atau juklak tahun 2021 untuk pengadaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang mengarahkan Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS.

Sementara itu, tersangka Mulyatsyah diduga mengarahkan jajarannya untuk menggunakan Chrome OS sebagai pengadaan TIK. Pada 30 Juni 2022, dia diduga memerintahkan PPK bernama Harnowo Susanto untuk memilih ke salah satu penyedia dengan menggunakan Chrome OS.

Mulyatsyah membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK Sekolah Menengah pertama tahun 2020 yang mengarahkan Chrome OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menggunakan Chrome OS pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sebagai tidak lanjut dari peraturan Menteri Pendidikan Nomor 5 tahun 2021 yang dibuat oleh Nadiem selaku Menteri. (han,ant,ist/lut)

RAZIA PABRIK HYUNDAI DI AS, ADA SATU WNI

Otoritas Imigrasi Amerika Serikat (ICE) menggerebek pabrik baterai kendaraan listrik Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia. ICE menangkap dan menahan 475 orang, sebagian merupakan WN Korea Selatan dan ada satu warga negara Indonesia (WNI) menurut pihak berwenang pada Jumat (5/9/2025).

Operasi tersebut merupakan penegakan hukum terbesar yang dilakukan oleh ICE yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 di antaranya warga negara Korea Selatan.

Agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) untuk Georgia, Steven Schrank, mengatakan bahwa operasi penangkapan yang dilakukan pada Kamis (4/9/2025). Tindakan tersebut dilakukan setelah investigasi selama beberapa bulan terhadap Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan WNI berinisial CHT tersebut ada di Pabrik Hyundai Metaplant. Ketika razia berlangsung. Saat itu, CHT sedang dalam kunjungan bisnis di Hyundai dan memiliki dokumen lengkap untuk agendanya di AS tersebut.

"CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dengan dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan," kata Judha dalam keterangan yang dilansir dari Antara, Minggu



Screenshot video razia yang dilakukan ICE AS di pabrik baterai Hyundai di Georgia. (ist)

(7/9/2025).

Terkait dengan penangkapan CHT, KJRI Houston telah berkomunikasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia, tempat CHT saat ini ditahan. Namun pihak ICE masih belum memberikan informasi yang lebih rinci terkait CHT usai ditangkap.

KJRI juga telah berkomunikasi dengan rekan kerja WNI tersebut serta pihak Hyundai Metaplant, kata Judha. "KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT," katanya.

Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Jumat (5/9/2025) Presiden AS, Donald Trump, memberikan berkomentar. "Saya akan mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal, dan ICE hanya menjalankan tugasnya," katanya.

Sementara, seorang pejabat ICE, Steven Schrank membenarkan penggerebekan dan penahanan tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagian dari mereka yang ditahan telah melintasi perbatasan AS secara ilegal. Sebagian lainnya tiba dengan visa yang melarang mereka bekerja, dan sebagian lagi melebihi batas waktu visa kerja.

Operasi tersebut melibatkan HSI, FBI, Bea Cukai dan Patroli Perbatasan, Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api (ATF), Badan Penegakan Narkoba (DEA), dan US Marshalls.

ICE merilis sebuah klip video pendek dari penggerebekan di lokasi pabrik Korea, yang memperlihatkan para pekerja, baik Korea maupun dari negara lain, sedang diperiksa, diborgol dengan borgol dan rantai logam, lalu dimasukkan ke dalam kendaraan "pengangkut narapidana."

Merespons razia tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung

telah memerintahkan upaya untuk menanggapi penangkapan ratusan warga negaranya dalam penggerebekan imigrasi Georgia tersebut.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, mengatakan Presiden Lee telah menginstruksikan para pejabat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Cho mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menanggapi penangkapan lebih dari 300 warga Korea di pabrik yang sedang dibangun itu. Ia kemungkinan akan pergi ke Washington, DC, untuk bertemu dengan para pejabat jika diperlukan.

Cho Hyun siap bertolak ke Washington guna membahas penahanan ratusan warga negaranya di pabrik baterai Hyundai tersebut. "Kami sangat prihatin dan merasa sangat bertanggung jawab terhadap penangkapan warga negara kami. Kami akan segera membahas pengiriman seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri ke lokasi tersebut, dan jika perlu, saya akan secara pribadi pergi ke Washington untuk berkonsultasi dengan pemerintah AS," katanya pada hari Sabtu (6/9/2025).

Ia menekankan bahwa hak dan kepentingan warga negara Korea Selatan serta operasi bisnis perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di AS tidak boleh dilanggar, menurut laporan kantor berita resmi Korea Selatan Yonhap yang dilansir dari Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa staf konsuler belum dapat bertemu dengan seluruh warga Korea yang ditahan di pusat tersebut, dan pertemuan lanjutan akan dilanjutkan pada Minggu pagi waktu setempat.

Ketika ditanya kapan para tahanan tersebut diperkirakan akan dibebaskan, Cho berkata, "Tidak ada hal yang bisa kami bicarakan saat ini."

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang beroposisi di Korea Selatan bereaksi dengan marah terhadap penahanan tersebut. Mereka memperingatkan bahwa penahanan itu dapat menimbulkan risiko serius bagi negara.

"Ini adalah masalah serius yang dapat mengakibatkan dampak yang lebih luas bagi perusahaan dan komunitas Korea di seluruh Amerika Serikat," kata Ketua PPP, Jang Dong-hyeok, dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara senior PPP, Park Sung-hoon, menyalahkan Lee atas insiden tersebut. Ia mengatakan bahwa diplomasi pragmatis Lee terhadap AS gagal menjamin keselamatan warga negara dan daya saing bisnis Korea Selatan. (han,ant,ist/lut)



CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dengan dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan, KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,"

**JUDHA
NUGRAHA**

Direktur Pelindungan WNI
Kemlu RI

KRONOLOGI RAZIA PABRIK HYUNDAI DI GEORGIA

- 4 September 2025**
Otoritas Imigrasi AS (ICE) menggerebek pabrik baterai Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia, setelah investigasi berbulan-bulan.
- 5 September 2025**
ICE mengumumkan 475 orang ditahan, termasuk 300 WN Korea Selatan dan 1 WNI berinisial CHT. Presiden AS Donald Trump menyebut mereka "imigran ilegal."
- 6 September 2025**
Menlu Korea Selatan Cho Hyun menyatakan keprihatinan, membentuk tim penanganan, dan membuka opsi pergi ke Washington. Partai oposisi PPP menyalahkan Presiden Lee Jae-myung atas lemahnya diplomasi.
- 7 September 2025**
Kemlu RI memastikan CHT hanya sedang business trip dengan dokumen lengkap. KJRI Houston memberi pendampingan kekonsuleran. Konsuler Korsel melanjutkan pertemuan dengan warganya yang ditahan.

